

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh karakteristik pemerintahan daerah yang diproksikan pada populasi dan indeks pembangunan manusia, rasio kemandirian dan ukuran legislatif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia. Untuk data sekunder dikumpulkan dari 34 Provinsi seluruh Indonesia dari tahun 2018-2020. Sebanyak 102 data diolah menggunakan analisis regresi linear berganda.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Populasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia.
3. Rasio Kemandirian tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia.
4. Ukuran Legislatif tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia.

5.2 Keterbatasan

Selama melakukan penelitian ini peneliti menyadari masih terdapat kelemahan dan kekurangan, hal ini terjadi karena adanya beberapa keterbatasan yang peneliti hadapi. Secara umum keterbatasan tersebut adalah :

1. Variabel dalam penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel independen yaitu populasi, indeks pembangunan manusia, rasio kemandirian dan ukuran legislatif .
2. Karena sulitnya akses untuk memperoleh data yang dikumpulkan sehingga membuat penelitian tidak maksimal dalam hasil.
3. Sampel dari penelitian ini hanya dilakukan pada daerah Provinsi saja. Sehingga penelitian hanya berfokus pada daerah provinsinya saja.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel independen yang diduga memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan melakukan penelitian sejenis dengan memperlebar tahun penelitian agar jumlah sampel lebih banyak.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah daerah penelitian karena hal ini mampu memberikan hasil berbeda dengan adanya perbedaan budaya antar provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Albab, M. U. (2019). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Lkpd) (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2016). *Skripsi*, candra maulana.
- Amaliah, E. F. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2), 1–13.
- Andriani, M., Santi, E., & Mustika, R. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2014-2016. *Akuntansi Dan Manajemen*, 14(1), 1–14.
- BPK RI. (2020). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I) Tahun 2020. Diambil kembali dari www.bpk.go.id.
- Budiarto, D. S., & Indarti, L. (2019). Apakah Karakteristik Pemerintah Daerah Berpengaruh Pada Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah? Riset Pada Kabupaten Di Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 12(1).
- Falikhatun, F., Wahyuni, S., Niswah, M. A., & Nilasakti, A. O. (2020). Financing Type And Sustainability Reporting: Financial Performance As Mediating Variable. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 12(1), 34–45.
- Faruqi. (2020). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Ukuran Legislatif, Tingkat Penyimpangan Dan Tingkat Ketergantungan Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Akuntansi dan Manajemen*.
- Feriyanti, M., Hermanto, H., & Suransi, N. K. (2016). Determinan Kepatuhan Pada Ketentuan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Barat). *InFestasi*, 11(2), 171.
- Fuadi, M. Z., & Asmara, J. A. (2020). Penerimaan Dari Pemerintah Pusat, Ukuran Legislatif, Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(1), 96–106.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jessica, N., & Suhartono, S. (2020). Pengaruh Intergovernmental Revenue, Indeks Pembangunan Manusia, Kekayaan Daerah, Dan Opini Audit

- Terhadap Pengungkapan Sukarela (Studi Empiris : Pemerintah Daerah Di Pulau Sumatera Tahun 2018). *Akuntansi Keuangan*, 9(021), 14–27.
- Khasanah dan rahardjo. (2014). Pengaruh karakteristik, kompleksitas, dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 864–874.
- Lubis, N. K. (2017). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Transparansi Pelaporan Keuangan dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi(JENSI)*, 1(2), 124–136.
- Najah, U., & Purwati, A. S. (2019). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemda, Indeks Pembangunan Manusia, dan Kualitas Hasil Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD. *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*, 4(2), 70-88.
- Naopal, rahayu dan Y. (2017). *Effectiveness of Public Sector Audit Reports in Indonesia (Preceding and Following Audit Reform)*. 1–381.
- Nurabila. (2018). Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(Lkpd).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pramesti, S. P., & Misran, A. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(3), 611–623.
- Puspa, A., & Rahayu, S. (2021). Pengaruh Kekayaan Daerah, Umur Administratif Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Website Resmi Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia pada Tahun 2019).
- Putri, W. M., & Arza, F. I. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1111–1130.
- Rizta, Naswa Afra. (2021). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemandirian Daerah, Intergovernmental Revenue, Ukuran Legislatif, Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 1(3), 82–91.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Research Methods for Business*. New York: Jhon Wiley & Sons LTD.
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik

- Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 154– 170. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21002/jaki.2012.10>
- Simbolon, H. A. U., & Kurniawan, C. H. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Di Seluruh Indonesia. *Jurnal Modus*, 30(1), 54–70.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardjanto, D., & Yulianingtyas, R. R. (2011). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8(1), 1–94.
- Suryantini, D. & C. (2018). The Effect Of Regional Financial Performance On Capital Expenditure And Economic Growth In Each District / Cities In Bali Province. *International Journal Of Economics, Commerce And Management, United Kingdom, The Effect*.
- Utami, S. R., & Sulardi, S. (2020). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Opini Audit, dan Rasio Kemandirian terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 19(2), 253.
- Winarna, J., & Murni, S. (2007). Pengaruh Personal Background, Political Background Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran Dprd Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Di Karesidenan Surakarta Dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006). *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, Vol.9 No.2(2), 136–152.
- Wirokartono, Sukarno. (2009). *Pembangunan Provinsi Gorontalo Perencanaan dengan Indeks Pembangunan Manusia*. Gorontalo. Bappenas